

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)  
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA**

***COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH THE VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITY PROGRAM  
(BUMDesa) IN IMPROVING THE FAMILY ECONOMY***

<sup>1</sup>Moch Alfi Ridho Tanu Jaya, <sup>2</sup>Lilis Karwati, <sup>3</sup>Ahmad Hamdan  
Universitas Siliwangi Tasikmalaya

E-Mail: 1)tjridho@gmail.com, 2) liliskarwati@unsil.ac.id, 3)ahmad.hamdan@unsil.ac.id

Naskah diterima tanggal : 3 Februari 2022, disetujui tanggal 9 Maret 2022

**Abstract:** *Improving the family economy is inseparable from government and community involvement, in community empowerment programs through the BUMDESA program, can develop businesses that are considered potential and productive for the welfare of the people. The purpose in this study is to find out the process of community empowerment through the BUMDesa program in improving the family economy. The research approach used is qualitative research methods with a descriptive approach. The types of data collection in this study are through observation, interviews, and documentation. The results of the study were obtained that community empowerment through the BUMDesa program was formed as a forum to develop local potentials in groups by awareness, strengthening, education and training on the economy, agriculture, animal husbandry and services, protection of institutions, support and maintenance to motivate and increase the participation of jayaratu village communities. The changes that occurred in BUMDesa members can be mentioned that community empowerment through the BUMDesa program is successful, because BUMDesa members carry out their duties in managing business units, both in agricultural businesses, livelihoods, and service businesses. This can make BUMDesa members get food and nutrition adequacy and increased family economic income. This collaboration is what supports the achievement of community development through community empowerment.*

**Keywords:** *Empowerment, BUMDesa, Family Economy*

**Abstrak:** Meningkatkan ekonomi keluarga tidak terlepas dari pemerintah dan keterlibatan masyarakat, dalam program pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDESA, dapat mengembangkan usaha- usaha yang dianggap potensial dan produktif untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDesa dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDesa dibentuk sebagai wadah untuk mengembangkan potensi-potensi lokal secara berkelompok dengan dilakukan penyadaran, penguatan, pendidikan dan pelatihan tentang ekonomi, pertanian, peternakan dan jasa, perlindungan periinan lembaga, penyokongan dan pemeliharaan untuk memotivasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa Jayaratu. Perubahan yang terjadi dalam anggota BUMDesa ini dapat di sebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDesa berhasil, karena anggota BUMDesa menjalankan tugasnya dalam mengelola unit-unit usaha, baik dalam usaha pertanian, usaha peternakan, dan usaha jasa. Hal itu bisa menjadikan anggota BUMDesa mendapat kecukupan pangan dan gizi serta peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Kolaborasi inilah yang menunjang tercapainya pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

**Kata kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, BUMDesa, Ekonomi Keluarga.

## A. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi masalah yang tidak kunjung usai dan kompleks baik di wilayah perkotaan ataupun pedesaan. Pemerintah mulai dari zaman Orde Baru sampai saat ini Era Demokrasi telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan dengan berbagai pendekatan, baik secara *top down* ataupun *bottom up* melalui berbagai kebijakan (Ras, 2016). Penanggulangan kemiskinan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah daerah, pihak swasta bahkan masyarakat secara umum dan pihak yang lainnya juga perlu berperan dalam penanggulangan masalah kemiskinan, hal ini dikarenakan masalah kemiskinan tidak hanya di tanggulangi dari satu aspek saja (Bhinadi, 2017).

Menurut website Kotaku yang berjudul peran pemda dalam penanggulangan kemiskinan (2007, Juli 17). Diakses pada Februari 15, 2022 dari artikel <http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaarsipd/etil.asp?mid=1820&catid=2> pemerintah daerah memiliki peran membangun daerah menjadi lebih terbuka, karena adanya aturan yang memberikan kewenangan untuk mengatur otonominya sendiri agar mampu mandiri dan menyelesaikan persoalan kemiskinan dengan berbagai program melalui bantuan modal, pembangunan sarana dan prasarana pendukung desa tertinggal serta berbagai program lainnya. Pembangunan desa memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan

warganya karena merupakan bagian yang bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional.

Mardikanto (2019) mengemukakan pembangunan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat secara berkesinambungan untuk memecahkan berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi masyarakat demi terciptanya mutu atau kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat. Pembangunan juga dapat dikatakan sebagai suatu pencapaian sebuah masyarakat menjadi lebih maju. Menurut Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja (1988) hakekat pembangunan adalah perubahan sebuah kondisi menjadi lebih baik, sehingga setiap pembangunan harus disertai dengan perencanaan dan arah perubahan yang matang sehingga jelas tujuan yang akan dicapainya. Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak sebatas kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan saja, akan tetapi kebutuhan lain yang dapat menunjang proses kehidupan bermasyarakat.

Sebagai konsekuensi pemenuhan kesejahteraan hidup, masyarakat perlu memiliki berbagai kemampuan dan keterampilan yang mumpuni agar dapat kebutuhan kesejahteraan hidup masyarakat dapat terpenuhi, seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, keamanan dan kebutuhan lainnya.

Pemerintah desa memiliki peran yang strategis untuk langsung mensejahterakan masyarakat di lingkungannya. Jika desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, maka desa bisa

dikatakan telah mampu mensejahterakan warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya. Pemerintah Desa menurut Eko, dkk (2014) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban membantu meringankan dan menjalankan tugas pemerintah pusat mulai dari tugas administratif hingga memberikan berbagai bantuan kepada warga masyarakat serta berbagai tugas lainnya dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat dan potensi wilayahnya. Desa merupakan fondasi dari sistem kemasyarakatan yang kompleks mulai dari politik, sosial, budaya serta hukum dan keamanan. Desa sebagai akar perkembangan ekonomi di Indonesia, melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri secara otonomi untuk mensejahterakan rakyatnya melalui berbagai pelayanan, pemberdayaan serta peningkatan daya saing, sehingga desa membutuhkan badan usaha dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Desa memiliki kewenangan dalam memajukan perekonomian perdesaan sehingga tercipta kegiatan ekonomi produktif, kewirausahaan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, salah satunya dapat dilakukan dengan memosisikan peran Badan Usaha Milik Desa yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam upaya membangun perekonomian desa (Suparji, 2019).

Salah satu program peningkatan

kesejahteraan masyarakat di desa adalah melalui program pemberdayaan masyarakat yang dipadukan dengan program yang dikembangkan oleh badan usaha milik desa. Program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya sekedar program pembangunan, kegiatan pelatihan keterampilan, akan tetapi perlu dilakukan program pendampingan agar terwujud masyarakat yang berdaya dan memiliki kemandirian. Bentuk pemberdayaan harus sesuai dengan potensi yang ada di daerah dan dapat diakses oleh masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan dan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kehidupan yang lebih baik lagi ini harus mulai dari diri sendiri, keluarga, teman, tetangga, lingkungan sekitar, hingga ke ranah yang luas. Jika prosesnya tidak dilakukan dengan baik bisa jadi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sebagai tujuan dari upaya pemberdayaan itu, belum bisa diraih bahkan mungkin makin jauh dari kenyataan.

Pemberdayaan dan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kehidupan yang lebih baik lagi ini harus mulai dari diri sendiri, keluarga, teman, tetangga, lingkungan sekitar, hingga ke ranah yang luas. Jika prosesnya tidak dilakukan dengan baik bisa jadi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sebagai tujuan dari upaya pemberdayaan itu, belum bisa diraih bahkan mungkin makin jauh dari kenyataan.

Di Kabupaten Tasikmalaya hampir

setiap desa mendirikan BUMDesa salah satunya yaitu. Desa Jayaratu Kecamatan Sariwangi yang masih berjalan sampai saat ini, badan usaha di desa Jayaratu bernama BUMDesaa Rahayu. BUMDesaa rahayu ini sudah berjalan sejak tanggal 23 bulan desember tahun 2017 yang memiliki 3 unit usahayaitu bidang Pertanian buah pepaya californiabidang peternakan ayam petelur, dan laku pandai brilink dibidang jasa, program BUMDesa ini untukseluruh warga jayaratu. ketiga bidang ini respon dari masyarakat sangat baik. Tetapi sebagian masyarakat masih berasumsi BUMDesaa itu seperti bank dalam bidang jasa, asumsi dari masyarakat ketika mempunyai keinginan untuk usaha dan kepelelerluan dalam segala hal dalam finansial di hubungkan dengan BUMDesa tetapi tupoksi BUMDesa itu badan usaha milik desa, jadi pandangan dari masyarakat BUMDesaa ini kepengjangan dari bank ranyak Indonesia (BRI). karena sosialisai dan koordinasi yang kurang efektif hanya mengandalkan kepala dusun ketika ada program dari desa, selanjutnya dalam bidangperternakan dan pertanian sebelum adanya virus covid 19 kedua pogram ini berjalan dengan baik melihat potensi rencana tahun 2018 sangat mengiurkan. Di bidang jasa masih berjalan sampai saat ini, dibidang pertanian yaitu papaya California BUMDesa mengadakan lahan dua hektar dengan kontrak dua tahun, adanya virus covid 19 menjadi hambatan dan penjualan yang sangat murah, di bidang peternakan ayam petelur, BUMDesa mengalokasikan 300 ekor ayam petelur, tetapi adanya virus covid 19 menjadi hambatan juga, pakan

yang sangat mahal, disisi lain harga jual menurun, dan tidak ada pelatihan, BUMDesa hanya merekrut masyarakat yang sudah mempunyai bakat dalam bidang pertanian dan perternakan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan permasalahan kondisi yang terjadi di desa Jayaratu kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya diantaranya Kurangnya keterampilan, karena tidak adanya pelatihan terlebih dahulu kepada masyarakat yang akan mengelola program tersebut, sosialisasi dan koordinasi yang kurang efektif, baik koordinasi pengurusan BUMDesa dengan kepala dusun atau sosialisasi kepada masyarakat. harga pakan sangat tinggi dan penjualan yang sangat rendah, melalui BUMDesaa Rahayu berbagai cara dilakukan dalam upaya memberdayakan masyarakat dan berjalan sampai sekarang dengan mencari solusi sebagai upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat jayaratu.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menurut Creswell (2009) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi makna dengan mengumpulkan data dari partisipan yang menjadi subjek penelitian dalam setting alamiahnya.

Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai kunci untuk mengetahui kondisi alamiah di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisa validitas data

penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu menggabungkan temuan di lapangan dengan menekankan setiap makna dari berbagai temuan daripada generalisasi (Sugiyono, 2017).

Subjek dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari 1 orang kepala desa, 1 orang ketua BUMDesa, dan 4 orang anggota BUMDesa rahayu.

### C. PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDesa di desa jayaratu ini tentunya menjadi wadah bagi setiap warga masyarakat untuk menyumbang ide dan gagasannya guna membuat masyarakat desa jayaratu lebih berdaya dan menginspirasi desa- desa lain di sekitarnya.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDesa tidak secara langsung terlaksana dengan baik tetapi melalui beberapa tahapan yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya seperti: Tahap pemungkinan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat adanya wadah untuk mengembangkan potensi lokal secara kelompok, mulai dibentuknya BUMDesa kemudian diperkenalkan program BUMDesa dan peyadaraan, penguatan adanya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh desa jayaratu dan bekerja sama dengan kecamatan sariwangi, yaitu diadakanya kegiatan seminar tentang peningkatan ekonomi, dan pertanian, perternakan, dan jasa., perlindungan adanya perizinan lembaga kemudian setiap membuat BUMDesa tidak terlepas

dari administrasi dan musyawarah sesuai dengan UUD nomor 6 tahun 2014., peyokongan dan pemeliharaan adanya partisipasi dari masyarakat desa jayaratu. Hal ini sesuai dengan Serangkaian kegiatan pemberdayaan tersebut sudah sesuai dengan teori tahapan pemberdayaan yang dikemukakan oleh edi Suharto (2014) yang disingkat menjadi 5P, yaitu pemungkinan, penguatan, penyokongan, pendampingan dan pemeliharaan, Tim Delivery dalam Mardikanto (2020) Menawarkan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap 1. Seleksi lokasi.

Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat.

- a. Kajian keadaan pedesaan partisipatif.
- b. Pengembangan kelompok.
- c. Peyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan.
- d. Monitoring dan evaluasi partisipatif.

Tahap 4. Pemandirian masyarakat.

Sebagai pemimpin ketua BUMDesa dan kepala dusun mempunyai peran yang berpengaruh bagi warga-warga masyarakatnya, maka dari itu tahap perencanaan dan pengorganisasian ini dilakukan dengan diadakanya sosialisasi dan rapat serta diskusi yang berawal musyarah desa dan musdus, dalam tahap ini para masyarakat yang memiliki

ide/gagasan berdiskusi mengenai program-program pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDesa yang akan dilaksanakan dan diajukan untuk disetujui oleh kepala desa jayaratu. Dalam tahap ini dirancang beberapa kemungkinan yang akan terjadi ketika pelaksanaan dari program-program tidak sesuai rencana.

Setelah tahap perencanaan dilakukan tahap pelaksanaan atau , tahap ini menjadi inti dari tahap-tahap sebelumnya yakni tahap pelaksanaan program merupakan tahap yang bisa menjadi tolak ukur berhasil tidaknya sebuah pelaksanaan program dari apa yang telah dirancang dan direncanakan. Dari tahap pelaksanaan inilah program yang dilaksanakan bisa dievaluasi untuk dikembangkan, dilanjutkan, atau diberhentikan demi menghasilkan manfaat yang lebih luas. Dimana hasil evaluasi dijadikan sebagai umpan balik dalam untuk rencana kedepan pelaksanaan pembangunan masyarakat tentunya membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang seimbang agar tercapainya pembangunan yang berkelanjutan Komunikasi yang dimaksud tidak hanya komunikasi antar warga masyarakat saja melainkan komunikasi warga masyarakat dengan pemerintah juga sebagai fasilitator dari pemberdayaan itu sendiri. pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDesa rahayu di desa jayaratu dilaksanakan dengan selalu menjunjung tinggi prinsip gotong royong agar terciptanya sebuah hasil dari pemberdayaan masyarakat yang diharapkan. Dalam hal ini sudah sesuai

dengan teori yang dikemukakan oleh Smith (dalam Kholilurrohman, 2016) bahwa kegiatan dalam fungsi pengawasan suatu perusahaan atau organisasi (a) penelian dalam suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan, (b) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, (c) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDesa rahayu juga tentunya perlu diadakanya monitoring dan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan guna memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang telah terjadi. Pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDesa rahayu dimana setiap program-program yang diselenggarakan merupakan program-program pemberdayaan masyarakat yang telah dirancang untuk dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat. Program-program pemberdayaan ini dibagi dalam beberapa kelompok sesuai sasaran dari program.

Program-program pemberdayaan yang ada dalam program BUMDesa yaitu : unit usaha dalam bidang pertanian, peternakan dan jasa adalah usaha pepaya california, ayam petelur, dan brilink, masyarakat yang mengelola dan dikerjakan oleh masyarakat desa jayaratu guna untuk meningkatkan ekonomi kelompok dan ekonomi keluarga. Hal sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Smith (dalam Kholilurrohman:2016)

bahwa kegiatan yang dilakukan oleh badan atau organisasi dalam fungsi pengawasan adalah (a) mengevaluasi

dalam pencapaian tujuan dan sasaran (b) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, (c) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.

Pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDesa rahayu yaitu berangkat dari potensi yang ada di wilayah desa jayaratu, dan melihat masyarakat yang masih belum mempunyai pekerjaan, dan adanya bantuan dari pemerintah kepada desa dalam bentuk anggaran yang sangat besar guna sebagian anggaran tersebut digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, atas dasar inilah muncul gerakan pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDesa.

Program yang ada di BUMDesa rahayu mempunyai tujuan dan harapan terwujudnya desa home industri baik dalam ketermapilan tangan, makanan. Masyarakat yang cerdas dengan adanya kegiatan keilmuan di suatu wilayah merupakan tolak ukur dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, kreatif dan inovasi di lingkungan desa jayaratu sendiri memiliki beberapa kegiatan dalam bidang usaha (usaha pepaya California, ayam petelur dan brilink) serta dengan adanya gotong royong maka akan menciptakan masyarakat yang mempunyai jiwa kewirausahaan.

Masyarakat mandiri juga menjadi salah satu tujuan dari program pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDesa rahayu, masyarakat menjadi mandiri misalnya dengan adanya perusahaan-perusahaan menjadi

gambaran bahwa perekonomian dalam suatu wilayah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini Desa Jayaratu mempunyai harapan menciptakan badan usaha milik desa yang sudah berjalan sangat lama yang dinamakan BUMDesa Rahayu.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat agar mandiri dan lebih berdaya yaitu membantu masyarakat agar lebih berdaya dan lebih mandiri. Hal ini sesuai dengan teori Suharto (2010) mengatakan bahwa tujuan utama pemberdayaan masyarakat untuk meberdayakan orang-orang yang lemah atau tidak berdaya baik karena masalah internal (kesadaran diri) atau eksternal (penindasan orang lain struktural sosial yang tidak dapat dibenarkan). Hal ini sesuai dengan teori Menurut Wijaya (2002) mengatakan tujuan pemberdayaan adalah untuk membangkitkan semua keterampilan yang ada dalam masyarakat dan mencapai tujuan, motivasi, kreatif, inisiatif serta penghargaan bagi orang-orang yang berprestasi.

Hal ini menunjukkan bahwa orang luar hanya sebagai fasilitator, motivator dan penggerak masyarakat untuk melakukan pemberdayaan untuk berdaya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih mandiri program pemberdayaan masyarakat pada dasarnya memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga pelaksanaan utamanya adalah masyarakat sendiri masyarakat yang memutuskan program, melaksanakannya dan menghasilkan hasil pemberdayaan. Di BUMDesa rahayu desa jayaratu pengelola

bukan hanya sebagai perencana, pengambil keputusan, tetapi ikut serta dalam melaksanakan program pemberdayaan tersebut. Pihak-pihak yang melakukan upaya pemberdayaan tersebut, dibalik usaha mulia memberdayakan masyarakat tidak jarang juga terkandung muatan kepentingan. Dalam hal ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George R. Terry dalam Siagin (1989) dalam Kholilurrohmah (2016) menyebutkan fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen, yaitu: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pengerakan), dan *controlling* (pengawasan).

Perubahan yang terjadi dalam anggota BUMDesa ini dapat disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDesa berhasil, karena anggota BUMDesa menjalankan tugasnya dalam mengelola unit – unit usaha, baik dalam usaha pertanian, usahapertanian, dan usaha jasa. Hal itu bisa menjadikan anggota BUMDesa mendapat kecukupan pangan dan gizi serta peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Hal ini sesuai dengan teori aspek keberdayaan Edi Suharto (2014:hlm.65) yaitu: kesadaran untuk berubah (*power within*), memperoleh akses (*power to*), kesiapan menghadapi hambatan (*power over*), kemampuan dan solidaritas (*power with*). dan Wilson (1996) dalam Bambang (2013) memaparkan ada 7 tahapan dalam sebuah siklus pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut: adanya keinginan dari masyarakat dalam upaya berubah menjadi lebih baik, masyarakat mampu untuk

melepaskan berbagai hambatan terhadap kemajuan dalam dirinya sendiri maupun hambatan pada kelompok, sudah menerima kebebasan tambahan dan bisa merasakan memiliki rasa tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya, upaya untuk mengembangkan peranan dan batasan terhadap tanggung jawab yang lebih luas juga dengan motivasi dan minat dalam hal melakukan pekerjaan dengan baik, mulai adanya hasil nyata peningkatan rasa memiliki yang lebih besar dan keluaran kinerja penghasilan yang lebih baik, terjadinya perubahan kesan dan perilaku pada dirinya, keberhasilan dari aspek peningkatan perasaan psikologi dari posisi bawah ke atas dan telah berhasilnya pemberdayaan pada dirinya yaitu dengan merasa tertantang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

#### **D. SIMPULAN**

Pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDesa dalam meningkatkan ekonomi keluarga mencakup pada pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P Yang dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) pemungkinan, penyuluhan dan sosialisasi oleh pengurus BUMDesa dan kepala dusun jayaratu yang secara tidak langsung mendorong masyarakat sehingga terbentuknya wadah BUMDesa yang dapat mengelola ketiga unit usaha (2) penguatan, diadakannya uji kompetensi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat; (3) Perlindungan, BUMDesa Rahayu memberikan bantuan, dan kemudahan untuk proses perijinan pendirian usaha



unit usahayang sudah dijalankan; (4) Penyokongan, BUMDesa Cisantana memberikan kemudahan dalam perolehan akses informasi masyarakat desa jayaratu, baik ninformasi mengenai unit usaha maupun informasi mengenai pemberdayaanmasyarakat, serta promosi unit ketiga unit usaha; (5) Pemeliharaan, BUMDesa Rahayu memberikan pendampingan agar terjadinya keseimbangan peran di dalam kelompok, namun belum ada proses pengkaderan pada generasi berikutnya. Proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDesa dalam meningkatkan ekonomi keluarga menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) *Planning* (Perencanaan), adanya tujuan yang sama dalam anggota kelompok, tujuan tersebut dituangkn dalam Visi dan Misi BUMDesa rahayu, serta mempersiapkan SDM yang mampu mengelola unit usaha melalui pelatihan dan peyuluhan (2) *Organizing* (Pengorganisasian), pembentukan struktur organisasi, dan pergantian kepemimpinan setiap 2 tahun sekali; dan pembagian peran (3) *Actuating* (Penggerakan), Menerapkan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada anggota kelompok agar dapatbekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan; (4) *Controlling* (pengawasan), melakukan evakuasi dan laporan akhir, serta solusi-solusi dalam pemecahan masalah.

Hasil pemberdayaan dapat diketahui melalui indikator

pemberdayaan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) masyarakat desa jayaratu memeiliki keinginan untuk berperan dalam mengembangkan program BUMDesa rahayu, ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan unit usaha. Selain itu para anggota kelompok masyarakat juga berusaha untuk mengembangkan potensi diri; (2) masyarakat mengkitu program BUMDesa dan pelatihan yang menunjukkan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok, serta kemudahan dalam kesempatan perolehan kredit. (3) Terpenuhinya kebutuhan hidup, perubahan dan kepemilikan aset, adanya perubahan peran didalam keluarga, serta peran dan keterlibatan di dalam masyarakat, yang menunjukkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan; (4) Adanya kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui program BUMDesa, adanya solidaritas terhadap sesama anggota kelompok, mampu mengatasi hambatan dalam pengelolaan unit usaha.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Bhinadi, A. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: Deepublish.
- Eko, S. dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS).
- Creswell, J. 2009. *Research Design. Qualitative, Quantitative and Mix Methods Approaches (3<sup>rd</sup> ed)*. Los Angeles: Sage.
- Kapasitas dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan. *Jurnal Maksipreneur*. Vol.

- 3, No. 1.
- Gunartin, Sunarsi, D. Hidayati, S. 2019. Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dengan Membuat Sandal Hias. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Mengabdikan Untuk Negeri*. Vol. 2, No. 1.
- Karwati, L. 2017. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Alam Setempat. *Jurnal Ilmiah Visi GTK PAUD dan DIKMAS*. Vol. 12, No. 1.
- Kholilurrohman, M. 2016. Pengelolaan Objek Data Tarik Wisata Religi di Kabupaten Rembang. *Skripsi UIN Walisongo Semarang*.
- Kotaku. 2007, Juli 17. *Peran Pemda dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Arsip Warta Kotaku. [http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaa\\_rsipdetil.asp?mid=1820&catid=2&](http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaa_rsipdetil.asp?mid=1820&catid=2&)
- Mardikanto, T. Soebiarso, P. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nursetiawan, I. 2018. Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDES. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4, No. 2.
- Dwiyanti, B.S., Jemadi. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan
- Ras, A. A. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Perennial*, Vol.1, No. 2, 56-63.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suparji. 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*. Jakarta Selatan: UAI Press.
- Tjokroamidjojo, B., Mustopadidjaja. 1988. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Wijaya, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

